

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal (Studi Empiris Pada Provinsi Di Indonesia Tahun 2020 Semester 1)

The Effect Of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, And Special Allocation Fund On Capital Expenditure (Empirical Study On Provinces In Indonesia In 2020 Semester 1)

Valda Meliantha Afifta¹, Sri Rahayu²

¹Prodi S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom, Bandung

²Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Telkom

³Valdamafifta@student.telkomuniversity.ac.id, ⁴Srirahayu@telkomuniversity.ac.id

Abstrak

Munculnya pandemic covid-19 menyebabkan adanya perubahan yang sangat signifikan di berbagai sektor terutama bagi Pemerintah Indonesia. Hal ini menyebabkan pemerintah melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020. *Refocusing* anggaran ini menimbulkan dampak yaitu penganggaran yang telah dibuat sebelumnya tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya sehingga berpengaruh pada belanja modal, dimana belanja modal tidak terealisasi dengan baik maka akan mempengaruhi pembangunan infrastruktur tidak berjalan dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus terhadap belanja modal di Indonesia, studi kasus pada pemerintah daerah provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 baik secara simultan maupun parsial. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Teknik yang digunakan adalah *purposive sampling*. Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan *software SPSS* versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan variabel pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi berpengaruh terhadap belanja modal. Sedangkan secara parsial, menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal, dana alokasi khusus tidak berpengaruh terhadap belanja modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Modal

Abstrack

The emergence of COVID-19 pandemic has led to significant changes in various sectors, especially for the Indonesian government. This has caused the government to reallocate and refocus the APBN and APBD expenditure budgets for fiscal years 2020. This budget refocusing has an impact, namely the budget that has been made previously cannot be carried out properly so that it affects capital expenditure, where capital expenditure is not realized properly it will affect infrastructure development not going well. This study aims to determine the effect of Regional Original Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Fund on Capital Expenditure in Indonesia, a case study of provincial government in Indonesia in 2020 semester 1, either simultaneously or partially. all provinces in Indonesia either simultaneously or partially. This research method uses quantitative methods. The sample selection technique used was purposive sampling. The analytical method used is multiple linear regression using SPSS software version 25. The result shows that the variables of regional original reveue, general allocation fund, and special allocation funds simultaneously had an effect on capital expenditure. While partially, it shows that regional original revenue and general allocation funds affect capital expenditure, special allocation fund have no effect on capital expenditure.

Keywords: Regional Original Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Capital Expenditure.

I. PENDAHULUAN

Berlandaskan ketentuan umum di UU Otonomi Daerah No 32 Tahun 24, otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat, dengan tujuan setiap daerah mampu memberikan kesejahteraan bagi publik, meningkatkan pelayanan khususnya di sektor publik dan mampu mengelola keuangan daerah secara optimal^[3]. Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran belanja modal guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2005, belanja modal adalah pengeluaran anggaran

untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan, dan aset tak berwujud^[6].

Belanja Modal pada seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2019-2020 semester 1 mengalami kenaikan secara berturut-turut, namun pada tahun 2020 semester 1 belanja modal mengalami penurunan yang sangat signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pandemi *COVID-19* yang membuat pemerintah kemudian melakukan realokasi dan *refocusing* anggaran belanja APBN dan APBD Tahun Anggaran 2020^[7]. *Refocusing* anggaran ini menimbulkan dampak yaitu penganggaran yang telah dibuat sebelumnya tidak bisa dilaksanakan sebagaimana mestinya^[1].

Berdasarkan penelitian terdahulu, terdapat inkonsistensi dari beberapa variabel. Oleh karena itu, hal tersebut menjadi dasar pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan tiga faktor yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada seluruh provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 secara simultan maupun parsial.

II. TEORI LITERATUR

A. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah dengan tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi^[5]. Desentralisasi fiskal memberikan kebebasan kepada daerah untuk mengatur segala urusan daerah sehingga dapat menghasilkan pendapatan yang kemudian akan dialokasikan untuk membiayai belanja modal^[2]. Pendapatan Asli Daerah berperan sangat penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena PAD menjadi sumber utama pendapatan suatu daerah, sebagai sumber dari pendapatan maka PAD harus digunakan semaksimal mungkin untuk belanja modal^[8]. Dengan demikian PAD berpengaruh positif terhadap Belanja Modal, yaitu semakin tinggi perolehan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga pengalokasian dana terhadap belanja modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Pendapatan Asli Daerah secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

B. Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan, Dana Alokasi Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dengan demikian, terjadi transfer yang cukup signifikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, kemudian pemerintah daerah dapat mengalokasikan dana ini untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum dengan mengalokasikan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal. Sehingga semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar belanja modal yang dapat dialokasikan oleh suatu daerah. Sehingga Dana Alokasi Umum berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

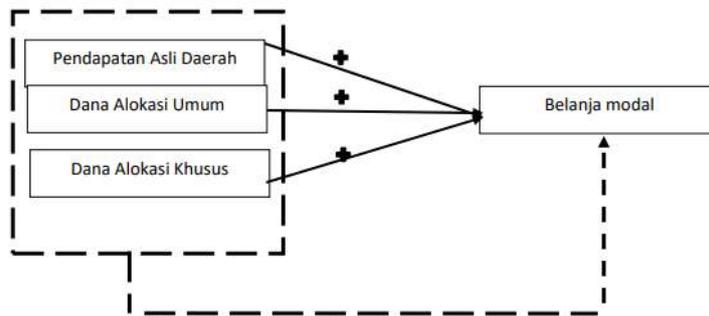
H₂ : Dana Alokasi Umum secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

C. Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Berdasarkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dengan adanya pengalokasian DAK diharapkan dapat mempengaruhi belanja modal, karena DAK cenderung akan menambah belanja modal guna meningkatkan pelayanan publik. Semakin besar Dana Alokasi Khusus yang diberikan oleh pemerintah pusat, maka semakin besar juga penyediaan pelayanan publik dan fasilitas umum melalui belanja modal. Sehingga Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif terhadap Belanja Modal. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut :

H₃ : Dana Alokasi Khusus secara parsial berpengaruh positif terhadap Belanja Modal

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat digambarkan kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 1 Kerangka Pemikiran

Keterangan:

- : Pengaruh Parsial
- - - - -> : Pengaruh Simultan

III. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah provinsi yang terdaftar di Indonesia. Teknik pemilihan sampel yang digunakan yaitu *purposive sampling* dan diperoleh 31 provinsi dengan periode penelitian tahun 2020 semester 1. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan dokumentasi dan studi kepustakaan. Data yang diolah adalah data sekunder yang bersumber dari website resmi DJPK Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Metode analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan *Software SPSS* versi 25. Persamaan analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian adalah:

$$Y = \beta_0 + \beta_1.PAD + \beta_2.DAU + \beta_3.DAK + \epsilon \quad (1)$$

Keterangan:

- Y : Belanja Modal
- β_0 : Konstanta
- β_1-3 : Koefisien regresi variabel bebas
- PAD : Pendapatan Asli Daerah
- DAU : Dana Alokasi Umum
- DAK : Dana Alokasi Khusus
- ϵ : Error term

IV. HASIL PEMBAHASAN

A. Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PAD	31	53,076,596,752	8,926,442,780,993	1,463,778,812,471.45	2,091,687,914,795.990
DAU	31	123,827,917,000	6,572,010,000,000	1,116,060,621,588.71	1,096,761,434,600.830
DAK	31	657,445,199	4,293,417,046,596	459,572,623,774.81	830,858,466,583.357
Belanja Modal	31	24,423,621.641	263,112,200,982	116,816,944,690.65	66,399,105,023.216
Valid N (listwise)	31				

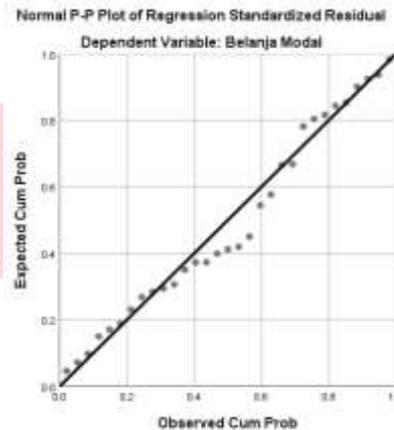
Sumber: Output SPSS 25

Nilai rata-rata pendapatan asli daerah pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp. 1.463.778.812.471,45. Nilai maksimum pendapatan asli daerah sebesar Rp. 8.926.442.780.993 yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 53.076.596.752 ditempati oleh Provinsi Maluku Utara. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada Pendapatan Asli Daerah sebesar 2.091.687.914.795,990. Nilai rata-rata dana alokasi umum pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp. 1.116.060.621.588,71. Nilai maksimum dana alokasi umum sebesar Rp. 6.572.010.000.000 yang dicapai oleh Provinsi Papua Barat. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 123.827.917.000 ditempati oleh Provinsi

Kalimantan Tengah. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada dana alokasi umum sebesar 1.096.761.434.600,830. Nilai rata-rata dana alokasi khusus pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp. 459.572.623.774,81. Nilai maksimum dana alokasi khusus sebesar Rp. 4.293.417.046.596 yang dicapai oleh Provinsi Jawa Barat. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 657.445.199 ditempati oleh provinsi Papua Barat. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada dana alokasi khusus sebesar 830.858.466.583,36. Nilai rata-rata belanja modal pada 31 provinsi di Indonesia tahun 2020 semester 1 sebesar Rp. 116.816.944.691,65. Nilai maksimum belanja modal sebesar Rp. 263.112.200.982 yang dicapai oleh Provinsi Sumatera Utara. Sedangkan nilai minimum yaitu sebesar Rp. 24.423.621.641 ditempati oleh Provinsi Banten. Secara keseluruhan, nilai standar deviasi pada belanja modal sebesar 66.339.105.023,216.

B. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas



Gambar 2 Histogram Uji Normalitas
Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan gambar 2 di atas dapat disimpulkan bahwa terlihat titik-titik menyebar disekitar diagonal dan mengikuti arah garis diagonal dan sebaliknya yang menunjukkan bahwa pola distribusi normal. Maka model regresi tersebut memenuhi asumsi normalitas. Uji normalitas diatas secara visual terlihat normal, namun secara statistik belum tentu normal. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengujian statistik dengan cara melakukan uji statistik non-parametrik (K-S *Kolmogorov-Smirnov*).

Tabel 2 Hasil Uji *Kolmogorov-Smirnov*
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		31
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000103
	Std. Deviation	53994452065.37 414000
Most Extreme Differences	Absolute	.133
	Positive	.133
	Negative	-.084
Test Statistic		.133
Asymp. Sig. (2-tailed)		.170 ^c

a. Test distribution is Normal.

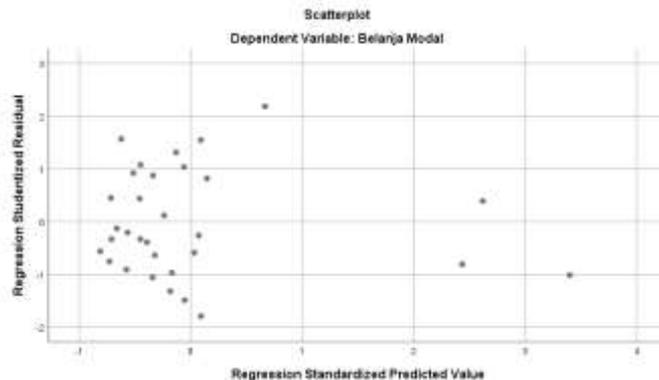
b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 2 diatas hasil uji normalitas menunjukkan bahwa nilai signifikansi *Asymp. Sig (2-tailed)* yaitu sebesar 0,170 sehingga data berdistribusi normal karena memiliki nilai probabilitas >0,05.

C. Uji Heteroskedastisitas



Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan gambar 3 diatas, dapat dilihat titik-titik tersebar diatas dan dibawah angka nol pada sumbu vertikal dan tidak membentuk pola tertentu atau terlihat acak, maka disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas juga dapat diketahui dengan cara melihat nilai probabilitas suatu variabel dengan ketentuan jika nilai probabilitas < 0,5 maka terdeteksi masalah heteroskedastisitas, dan jika > 0,5 maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

Tabel 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Coefficients ^a	
Model	Sig.
1 (Constant)	.000
PAD	.776
DAU	.328
DAK	.789

a. Dependent Variable: absresid

Sumber: Ouput SPSS 25

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa semua variabel memiliki nilai signifikan lebih dari 0,05. Sehingga tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

D. Uji Multikolinieritas

Tabel 4 Hasil Uji Multikolinieritas

Coefficients ^a				
Model	t	Sig.	Collinearity Statistics	
			Tolerance	VIF
1 (Constant)	4.746	.000		
PAD	2.164	.039	.493	2.028
DAU	2.095	.046	.971	1.030
DAK	-.396	.695	.504	1.985

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa nilai korelasi antar setiap variabel independen yang diuji > 0,10 maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas.

E. Analisis Regresi Linear Berganda

Berikut merupakan persamaan model regresi linear berganda dalam penelitian ini:

$$Y = 75.135.857.991.695 + 0,015.PAD + 0,020.DAU - 0,007.DAK + \varepsilon \quad (2)$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda tersebut, maka dapat dijelaskan bahwa koefisien sebesar 75.135.857.991.695 mengandung arti bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus bernilai nol atau tetap, maka nilai belanja modal yaitu sebesar 75.135.857.991.695. Koefisien regresi Pendapatan Asli Daerah sebesar 0,015 dan bertanda positif mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan Pendapatan Asli Daerah, maka nilai belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,015. Koefisien regresi Dana Alokasi Umum sebesar 0,020 dan bertanda positif mengandung arti bahwa setiap kenaikan satu satuan Dana Alokasi Umum, maka nilai belanja modal akan mengalami kenaikan sebesar 0,020. Koefisien regresi Dana Alokasi Khusus sebesar 0,007 dan bertanda negatif mengandung arti bahwa setiap penurunan satu satuan Dana Alokasi Khusus, maka nilai belanja modal akan mengalami penurunan sebesar 0,007.

F. Koefisien Determinasi

Berikut merupakan hasil pengujian koefisien determinasi

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.582 ^a	.339	.265	56915149846.455

a. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PAD

b. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS 25

Pada tabel di atas diketahui koefisien determinasi yang dilihat dari nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,265. Artinya 26,5% variasi dari variabel dependen belanja modal dipengaruhi oleh variabel independen yakni pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan dana lokasi khusus. Sedangkan sisanya sebesar 73,5% dipengaruhi oleh faktor – faktor lain yang tidak diamati dalam penelitian ini.

G. Hasil Uji Simultan (Uji F)

Berikut merupakan hasil uji analisis secara simultan (Uji F):

Tabel 6 Hasil Uji Simultan ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	44,803,208,821,323,53 5,000,000.000	3	149344029404411780 00000.000	4.610	.010 ^b
	Residual	874620256151995500 00000.000	27	323933428204442800 0000.000		
	Total	132265234436523090 000000.000	30			

a. Dependent Variable: Belanja Modal

b. Predictors: (Constant), DAK, DAU, PAD

Sumber: Output SPSS 25

Berdasarkan tabel 6 nilai signifikan yaitu sebesar 0,010. Nilai tersebut lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh secara simultan terhadap belanja modal.

H. Uji Parsial (Uji t)

Berikut merupakan hasil uji analisis secara parsial (Uji t):

Tabel 7 Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
	B	Std. Error		Beta	t	
1	(Constant)	75135857991.695	15832536105.815		4.746	.000
	PAD	.015	.007	.482	2.164	.039
	DAU	.020	.010	.333	2.095	.046
	DAK	-.007	.018	-.087	-.396	.695

a. Dependent Variable: Belanja Modal

Sumber: Output SPSS 25

a) Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi pendapatan asli daerah sebesar 0,039 ($<0,05$) dan memiliki arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0,15, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa pendapatan asli daerah secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, artinya semakin tinggi perolehan pendapatan asli daerah maka semakin tinggi juga pengalokasian dana terhadap belanja modal. Hal ini sejalan dengan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Widiasih & Gayatri, 2017) yang menyatakan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal^[10].

b) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dana alokasi umum sebesar 0,046 ($<0,05$) dan memiliki arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0,20, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima, yang berarti bahwa dana alokasi umum secara parsial memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal, dimana DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah yang berasal dari pemerintah pusat guna melaksanakan fungsi layanan dasar umum dengan mengalokasikan DAU terhadap belanja modal. Sehingga semakin besar DAU yang diterima oleh suatu daerah maka semakin besar belanja modal yang dapat dialokasikan oleh suatu daerah. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Priambudi, 2017) yang menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap belanja modal^[3].

c) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Hasil uji t menunjukkan bahwa nilai signifikansi dana alokasi khusus sebesar 0,695 ($>0,05$) dan memiliki arah negatif dengan nilai koefisien sebesar 0,07, sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a ditolak, yang berarti bahwa dana alokasi khusus secara parsial tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal. Hal ini dikarenakan penyerapan dana alokasi khusus lebih banyak untuk pendanaan kegiatan khusus yang sesuai dengan prioritas nasional sehingga pengaruhnya terhadap alokasi belanja modal cenderung sedikit. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Syukri & Hinaya, 2019) yang menyatakan bahwa dana alokasi khusus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap belanja modal^[9].

V. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa secara simultan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. Secara parsial, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal, sedangkan Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Belanja Modal.

REFERENSI

- [1]Junaidi, M., Sukarna, K., Arifin, Z., & Soegianto, S. (2020). Kebijakan Refocusing Anggaran Belanja Daerah dalam Penanganan Pandemi COVID-19. *Halu Oleo Law Review*, 4(2). <https://doi.org/10.33561/holrev.v4i2.14096>
- [2]Nurdiwaty, D., Zaman, B., & Kristinawati, E. (2017). Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan yang Sah Terhadap Belanja Modal di Kabupaten/Kota Jawa Timur. *Jurnal Aplikasi Bisnis*, 17(1). <https://doi.org/10.20885/jabis.vol17.iss1.art3>
- [3]Priambudi, W. (2017). Pengaruh PAD dan DAU terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Pulau Jawa Tahun 2013. *Jurnal Nominal*, VI(1).
- [4]Republik, I. (2004). *Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah*.
- [5]Republik, I. (2004). *Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan*.
- [6]Republik, I. (2005). *Undang-Undang No. 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*
- [7]Republik, I. (2020). *Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 117/KMK.07/2020 Tentang Penyesuaian APBD Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, Serta pengamatan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional*.
- [8]Rizal, Y. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kota Langsa. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 8(1).
- [9]Syukri, M., & Hinaya, H. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Anggaran Belanja Modal Kabupaten & Kota Provinsi Sulawesi Selatan. *Journal of Economic Management and Accounting*, 2(2). <https://doi.org/10.35914/jemma.v2i2.245>
- [10]Widiasih, N. N., & Gayatri. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Alokasi Umum , Dana Bagi Hasil Pada Belanja Modal Kabupaten / Kota Di Provinsi Bali. *E-Journal Akuntansi Universitas Udayana*, 18(3).